

**IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

SINDIKA ADELIA HASANAH

NPM. 1621020356

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2020 M

**IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

**SINDIKA ADELIA HASANAH
NPM :1621020356**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I :Dr. Bunyana Solihin, M.Ag

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Berdagang merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal mendorong masyarakat untuk ke sektor informal yang salah satunya menjadi pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) berusaha mengoptimalkannya dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) mengenai larangan pedagang kaki lima (PKL). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung? dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, dan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung sudah dilakukan oleh SATPOL PP Kota Bandar Lampung, akan tetapi memang belum sepenuhnya terlaksana dan SATPOL PP Kota Bandar Lampung terkesan belum memberikan efek jera dan belum memberikan sanksi yang tegas terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Berdasarkan perspektif hukum Islam *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam hal ini penertiban pedagang kaki lima (PKL) belum terlaksana sesuai dengan hukum Islam *Fiqh Siyasah*. Karena *Fiqh Siyasah* bertujuan untuk terciptanya kemaslahatan umat manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Sedangkan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandar Lampung terkesan belum efektif dalam menangani penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Oleh karena itu penertiban pedagang kaki lima (PKL) ini harus ditegaskan demi mencapai kemaslahatan umat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindika Adelia Hasanah
NPM : 1621020356
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 13 Maret 2020

Penulis,


Sindika Adelia Hasanah
NPM. 1621020356



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratinin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi **Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Sindika Adelia Hasanah**
NPM : **1621020356**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Bunyana Solihin, M.Ag
NIP. 195707051989031001

Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H
NIP. 197408162003122004

Ketua Jurusan,

Frenki, M. Si

NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Guntung Kota Bandar Lampung)" disusun oleh, Sindika Adolia Hasanah, NPM. 1621020356 program studi Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua

Frenki, M.Si

Sekretaris

Kartika S, M.Pd

Penguji I

Marwin, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Bunyana Solihin, M.Ag

Penguji III

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H



Mengetahui
Fakultas Syariah

Khairuddin, M.H

NIP. 196210221993031002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

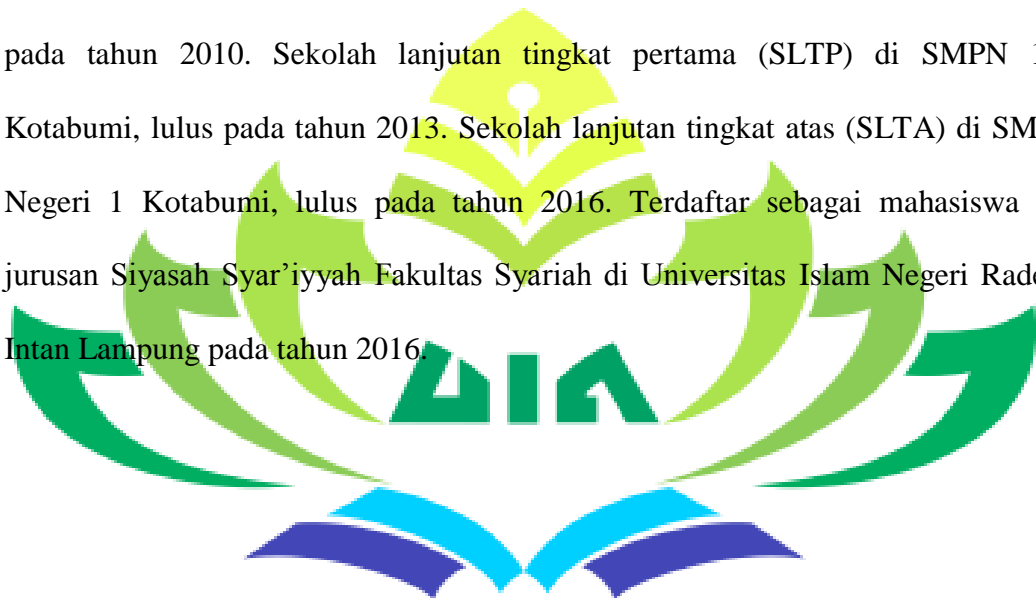
Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Ranto Susanto dan Ibundaku Puji Lestari, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada kedua adikku Pandu Wardana dan Mohammad Al-Faiz dan kepada keluargaku dimanapun berada terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
3. Bapak Dr. Bunyana Solihin, M.Ag dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk penyemangatku Muhammad Hasan Irham yang sudah selalu sabar mendampingi penulis dari pertama hingga selesai.
5. Sahabat sepupuku Dian Septiani dan Nurlinda Saputri.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Sindika Adelia Hasanah seorang anak perempuan yang dilahirkan di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1998 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Ranto Susanto dan Puji Lestari.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Islam Nurul Muttaqin Kelurahan Kelapa Tujuh, lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, lulus pada tahun 2010. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di SMPN 10 Kotabumi, lulus pada tahun 2013. Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di SMK Negeri 1 Kotabumi, lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyash Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritiky yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyash Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Bunyana Solihin, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung , kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Lurah Pasir Gantung Kota Bandar Lampung beserta staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian di Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung .
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandar Lampung beserta staf jajarannya yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitiannya.
12. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan, serta kasih sayangnya.
13. Penyemangatku Muhammad Hasan Irham yang telah banyak membantu, dan memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara-saudaraku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
15. Sahabatku Friends Until Jannah (Nur Inayatul Ainah, Ade Oktaviani, Fiky Amalia, Ambar Veronicha, Sagita Rahma Sari, Meilania Putri, Sayma Ayatina, Nurmala Viatama, Tya Fitri Sari).
16. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas H yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Sahabatku Kaaya Gengs (Nurjanannah Shinta Anggraini, Iska Syahhadah Lestari, Eka Prasetya Wati, Tri Fidiyanti).
18. Sahabat-sahabat KKN ku (Rosa, Irma, Sanda, Sari, Ayu, Linda, Firhan, Ghozel, Dian, Alpin, Asep, Firman).
19. Sahabat Kontrakanku (Widi dan Evi).
20. Sahabatku Nurjannah Sholeha, Ota Viani Widiyati, Septi, Ulfa Hamda Arifah

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 13 Maret 2020
Penulis

Sindika Adelia Hasanah
NPM. 1621020356



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| D. Fokus Penelitian..... | 8 |
| E. Rumusan Masalah..... | 9 |
| F. Tujuan Penelitian | 9 |
| G. Signifikansi Penelitian | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 11 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pedagang Kaki Lima | 19 |
| B. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan KetertibanUmum Dalam Hukum Islam | 21 |
| C. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum..... | 31 |
| D. Teori Hukum Islam | |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah | 34 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah | 37 |
| E. Tinjauan Pustaka | 55 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | |
| 1. Sejarah Singkat Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung..... | 62 |

| | |
|---|----|
| 2. Visi dan Misi Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung..... | 64 |
| 3. Latar Belakang Pedagang Kaki Lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung | 65 |
| 4. Jenis-jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung | 69 |
| B. Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum | 70 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung | 77 |
| B. Perspektif Hukum Islam Tentang Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima..... | 79 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 85 |
| B. Rekomendasi..... | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| |
|---|
| Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum |
| Lampiran 2 Pedoman Wawancara dan Kuesioner |
| Lampiran 3 Dokumentasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung |
| Lampiran 4 Hasil Turnitin |
| Lampiran 5 Konsultasi Skripsi |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Penelitian Dwi Amita Budiarti..... | 55 |
| 2. Penelitian Zulkardi..... | 57 |
| 3. Penelitian Eka Darma Suryadi..... | 58 |
| 4. Penelitian Widi Astuti..... | 60 |
| 5. Fasilitas di Pasar Pasir Gintung..... | 63 |
| 6. Jenis-jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Pasir Gintung..... | 70 |
| 7. Pengumpulan Data Responden Menggunakan Kuesioner..... | 77 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.¹ Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten / Kota.²

¹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 427.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (25).

3. Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur.³
4. Penertiban adalah proses, cara, dan perbuatan menertibkan.⁴
5. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan pasaran kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.⁵
6. Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama

³Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 1 ayat (6).

⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *ibid.* h. 1185

⁵Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 1 ayat (24).

Islam.⁶ Hukum Islam yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Fiqh Siyasah*.

Berdasarkan beberapa penegasan judul di atas maka yang dimaksud dengan judul ini yaitu studi yang menganalisis tentang pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain :

1. Alasan Objektif

- a. Dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) “Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Akan tetapi kenyatannya masih banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di ruas-ruas jalan Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung.

⁶Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3.

- b. Dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung ini mengganggu ketertiban kota dan juga kenyamanan pengguna fasilitas umum. Jalan yang seharusnya menjadi hak para pengguna jalan akan tetapi dijadikan sebagai tempat berdagang.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini yaitu Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung) dan memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti, yaitu prodi siyasah (Hukum Tata Negara).
- b. Daerah penelitian sangat mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal mendorong masyarakat untuk ke sektor informal yang salah satunya menjadi pedagang kaki lima (PKL). Kebanyakan orang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima karena hanya membutuhkan modal yang kecil. Oleh karena itu akibat banyaknya

pedagang kaki lima di sekitar ruas jalan Pasar Pasir Gantung hal tersebut yang menjadikan kawasan jalan menjadi terkesan kumuh, tidak tertata rapi juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan di kawasan Pasar Pasir Gantung, dan cenderung mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Misalnya seperti pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di teras-teras jalan sekitar kawasan Pasar Pasir Gantung yang seharusnya merupakan hak bagi para pengguna jalan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) berusaha mengoptimalkannya dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Berdasarkan pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.⁷

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang- undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

⁷Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pasal 30 ayat (2).

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.⁸

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hoessein bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat.⁹

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, meningkatkan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁰ Secara umum *good governance* adalah interaksi seimbang antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta, dimana lembaga pemerintah

⁸Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Llatar Belakang dan Masa Depan* (Jakarta: Lipi Press, 2007), h. 12.

⁹Irfan Setiawan, *Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Wahana Resolusi, 2018), h. 3.

¹⁰Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.199.

memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk perkembangan masyarakat dan sektor swasta.¹¹

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini maka penertiban pedagang kaki lima harus dilakukan dengan serius oleh aparat-aparat yang berkepentingan seperti aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melalui pendekatan yang manusiawi.

Dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini maka pemahaman para pedagang kaki lima sangat diharapkan untuk tata kehidupan kota yang rapi dan teratur. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gantung kota Bandar Lampung ini tidak hanya memerlukan peran dari pemerintah kota saja melainkan memerlukan partisipasi dari masyarakat kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia, baik kemaslahatan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Prinsip ini disebut *maqashid syari'ah*, yaitu mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik secara individu ataupun kolektif.¹² Jika dilihat dari adanya Pedagang Kaki Lima di ruas-ruas jalan Pasar Pasir Gantung ini maka tidak banyak mengandung kemashlahatannya justru lebih banyak mengandung keburukan dan kerugiannya. Misalnya para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di ruas-ruas jalan Pasar Pasir Gantung itu dikarenakan mereka tidak mau membayar sewa toko dan lain sebagainya, oleh sebab

¹¹*Ibid.* h. 209.

¹²Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 32.

itu maka yang terjadi ruas-ruas jalan yang seharusnya hak untuk para pengguna jalan justru dijadikan sebagai tempat berdagang yang mengakibatkan kemacetan dan merusak keindahan kota.

Untuk upaya realisasi mewujudkan kemashlahatan sebagai tujuan hukum Islam, para ulama sepakat dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu :

1. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang terlarang (berdasar pada tunjukan *nash*).
2. Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan (berdasarkan kaedah *Ma La yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*).
3. Menghindari sebab yang membawa kepada bencana (berdasarn kaedah *Saddu al-Dzari'ah*).¹³

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung)**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau

¹³*Ibid.* h. 38.

penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Penerapan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung).

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gantung kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Peneliti

ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 30 peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung.
2. untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

b. Secara Praktis

1. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syari'ah.
2. Memberikan sumbang khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yaang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data didalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama, baik dari individu atau perseorangan.¹⁵ Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada pedagang kaki lima, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei, dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Pada umumnya data sekunder digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun

¹⁴Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h.44.

¹⁵Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h.178.

untuk proses lebih lanjut. Data sekunder misalnya seperti media massa, lembaga pemerintah atau lembaga swasta.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi, dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari.¹⁷

Observasi ini dilakukan di Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada responden. Wawancara merupakan cara yang umum dan ampuh untuk memahami suatu keinginan/kebutuhan. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang tidak terstruktur. wawancara tidak struktur merujuk pada pemahaman suatu perilaku yang kompleks dari responden tanpa

¹⁶*Ibid.* h.202.

¹⁷Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), h.75.

memberlakukan suatu kategori apapun yang dapat membatasi lapangan penelitian.¹⁸

Teknik wawancara yang digunakan peneliti ini mempunyai kelebihan membuat suasana santai seolah-olah ia merasa hanya diajak ngobrol, namun tidak terlepas untuk dapat menangkap makna atau simbol dari isi pembicaraan tersebut. Wawancara ini ditujukan kepada Kepala UPT Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung, penggunaan jalan, pedagang kaki lima, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kota Bandar Lampung.

c. Metode Kuesioner

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan atau pengambilan data tertulis, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kumpulan pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia, sehingga responden hanya memilih dari jawaban apa yang sudah disediakan.¹⁹ Kuesioner ini ditujukan kepada pengguna jalan atau masyarakat yang ada di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung.

¹⁸*Ibid.* h. 82.

¹⁹Sugiono, Wisnu Wijayanto Putro, Sylvie Indah Kartika Putri, *Ergonomi Untuk Pemula (Prinsip Dasar & Aplikasinya)* (Malang : UB Press, 2018), h. 11.

d. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dokumentasi ini dapat berupa catatan yang berisi tulisan mengenai kenyataan, bukti, ataupun informasi, dapat pula berupa foto, pita-kaset atau pita-recording, slide, mikro film dan film.²⁰

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Objek psikologis dapat merupakan objek yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia dan memiliki sifat konkrit.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di ruas-ruas jalan Pasar Pasir Gintung kota Bandar Lampung yang terdiri dari kurang lebih 100 pedagang, para pengguna jalan sekitar 200 orang dalam sehari, dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang berjaga di pos Pasar Pasir Gintung kota Bandar Lampung yang berjumlah 8 orang..
- b. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Dalam pengambilan sampel penelitian dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili), sampel yang

²⁰*Ibid.* h. 86.

²¹*Ibid.* h. 121.

representatif yaitu sampel yang dapat menggambarkan karakteristik populasi secara tepat.²² Adapun pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik *Sampling Purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu.²³ *Purposive Sampling* juga disebut dengan *Judgemental Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang di maksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Yang peneliti gunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung 1 orang, 8 pedagang kaki lima, 2 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bandar Lampung, dan 10 sampel pengguna jalan atau masyarakat menggunakan kuesioner.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan penelitian kualitatif.

²²*Ibid.* h. 124

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 104.

Penelitian kualitatif lazim digunakan dengan pertimbangan pendekatan yang mengambil sudut pandang hasil amatan peneliti atas dasar pengumpulan data dan interpretasi melalui kontak langsung di lapangan.²⁴ Dalam penelitian ini pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung.

6. Analisis

Analisis masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Pasir Gantung Kota Bandar Lampung) yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berpikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus (individual). Proses berpikir induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang

²⁴Sugiarto, *Ibid.* h. 53.

bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berpikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.²⁵



²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.8.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki.²⁶

Asal muasal pedagang kaki lima terjadi pada saat penjajah Belanda membuat peraturan bahwa setiap jalan raya yang dibangun harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki yang disebut trotoar. Lebar trotoar untuk pejalan kaki adalah lima kaki (kaki: satuan ukuran panjang yang digunakan mayoritas bangsa Eropa) atau sekitar satu sengah meter.

Kemudian pada saat itu Indonesia merdeka. Trotoar untuk pejalan kaki itu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan, selain trotoar, emperan toko juga dijadikan tempat berjualan. Waktu itu disebut pedagang emperan, lama-lama disebut menjadi pedagang kaki lima atau PKL²⁷.

Dalam istilah lain juga istilah pedagang kaki lima atau PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.

²⁶Pedagang Kaki Lima (On-line) tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima (5 Januari 2020).

²⁷Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007). h.2.

Walaupun banyak versi tentang asal usul istilah pedagang kaki lima atau PKL yang diterangkan di atas, namun kini baik pedagang di emperan dan trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau pikulan sama-sama disebut pedagang kaki lima atau PKL. Singkatnya pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang berjualan tetapi tidak mempunyai kios atau toko.²⁸

Istilah lain pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan atau dibongkar pasang.²⁹

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yaitu :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik,
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja,
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai.³⁰

²⁸*Ibid. h. 6.*

²⁹Dian Azhari, Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas Dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No.1 Februari 2017.

³⁰Nurdian Susilowati, *Kewirausahaan* (Bandung: Ahli Media Book, 2017), h.10.

Karakteristik pedagang kaki lima (PKL) yaitu:

1. Pedagang kaki lima (PKL) pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, dan di areal parkir.
2. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, ada siang, sore, dan malam hari bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis dagangan.
3. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman hias/ikan hias, pakaian jadi, sepatu, tas, kerajinan, sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
4. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja dan sebagainya.
5. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.³¹

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Hukum Islam

Kebijakan diartikan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Hal ini menyangkut suatu dimensi yang luas,

³¹Rachmawati Madjid, Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Lingkungan Di DKI Jakarta, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 3, Agustus 2013.

karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu yang ada dalam suatu komunitas masyarakat.³²

Kebijakan pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Tujuan kebijakan pemerintah yaitu :

- 1) Untuk menciptakan suatu ketertiban di suatu lingkungan masyarakat,
- 2) Untuk melindungi sebuah hak-hak pada masyarakat,
- 3) Untuk menciptakan suatu ketenteraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat,
- 4) Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat.³³

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

³²A. Syamsu Alam, Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Kajian Implementatif, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.3, Juni 2012.

³³Dunia Pendidikan, "Tujuan Kebijakan Pemerintah: Pengertian, Sifat dan Macamnya" (On-Line), tersedia di: <http://duniapendidikan.co.id/tujuan-kebijakan-pemerintah-pengertian-sifat/> (6 Januari 2020).

terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.³⁴

Walaupun Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi DPRD tidak dapat mencampuri bidang Eksekutif, sebab bidang Eksekutif merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Kepala Daerah. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada pembagian tugas yang jelas. Kepala Daerah memimpin bidang Eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang Legislatif.

Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal di daerah mempunyai fungsi kembar, yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Kepala Wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom ia memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya Pemerintahan Daerah dan sebagai Kepala Wilayah ia memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.³⁵

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi.

³⁴Wikipedia, "Pemerintah Daerah di Indonesia" (On-Line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daeah_di_Indonesia (6 Januari 2020).

³⁵Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 28.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pembangunan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Hak dan kewajiban Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Menjalankan pimpinan pemerintahan daerah sebagai kepala wilayah, sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di daerahnya.
 2. Bertanggung jawab kepada Presiden smelalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.
 3. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah, dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
 4. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan hak dan kewajiban kepala daerah sebagai pimpinan daerah.
- Akan tetapi, karena banyaknya tugas kepala daerah, apabila dipandang perlu, kepala daerah dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya dalam hal-hal tertentu di luar dan di dalam pengadilan.

³⁶Deddy Supriady, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 61.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai hak, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan daerah serta membuat dan menetapkan APBD bersama-sama dengan kepala daerah.
2. Masing-masing anggota DPRD mempunyai hak-hak tertentu, seperti hak mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat, meminta keterangan, prakarsa, dan mengadakan penyidikan.³⁷

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah.³⁸

Peraturan daerah juga diatur dalam Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

³⁷Kansile, Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 146.

³⁸M. Pujo Darmo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Pemerintah Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), h. 12.

Pasal 237:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.³⁹

Penjelasan umum atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

³⁹Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam mewujudkan Peraturan Daerah ini diperlukan faktor-faktor pendukung agar kaidah-kaidah hukum dapat berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri atau Peraturan itu sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan wajib.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 70.

Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketenteraman dan perlindungan masyarakat seluruh warga Kota Bandar Lampung.

Kewenangan ini perlu mendapat kontrol dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.⁴¹

Kebijakan pemerintah dalam hukum Islam disebut dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴²

Kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan undang-undang disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif). Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am 6:57 (*in al-hukm illa lillah*). Akan tetapi, dalam

⁴¹Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁴²Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 177.

wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan dan kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Yaitu berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur dalam membuat dan menetapkan hukum antara lain:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Kebijakan pemerintah membuat peraturan atau hukum dalam Islam diatur dalam Q.S An-Nisa : 58 yaitu sebagai berikut.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa: 58).

Kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang⁴³ disyariatkan-Nya. Dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara perinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

⁴³Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 188.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi *keduanya*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di samping harus merujuk kepada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁴⁴

C. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga, memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan, dan kelestarian.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 189.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas 11 (sebelas) bab dan terdapat 80 pasal yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bab I (satu) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umum seperti pengertian-pengertian istilah yang terdapat di dalam peraturan tersebut.
- b. Bab II (dua) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang asas, maksud, dan tujuan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang asas, dan bagian kedua tentang maksud dan tujuan.
- c. Bab III (tiga) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang hak, dan bagian kedua tentang kewajiban.
- d. Bab IV (empat) terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan wewenang Polisi Pamong Praja yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang tugas, dan bagian kedua tentang fungsi dan wewenang.
- e. Bab V (lima) terdiri dari 60 pasal yang menjelaskan tentang ruang lingkup pengaturan kemudian terbagi menjadi tiga belas bagian, yaitu bagian kesatu tentang tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai, dan perparkiran, bagian kedua tentang tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, bagian ketiga tentang tertib kebersihan, bagian keempat tentang tertib lingkungan, bagian kelima tentang tertib sungai, saluran air,

situ/danau, dan kolam, bagian keenam tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu, bagian ketujuh tentang tertib tanah dan bangunan, bagian kedelapan tentang tertib kesehatan, bagian kesembilan tentang tertib kawasan tanpa rokok, bagian kesepuluh tentang tertib tempat hiburan umum dan keramaian, bagian kesebelas tentang tertib kependudukan, bagian keduabelas tentang tertib sosial, bagian ketigabelas tentang tertib peran serta masyarakat.

- f. Bab VI (enam) terdiri dari 4 pasal yang menjelaskan tentang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
- g. Bab VII (tujuh) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang kerjasama dan koordinasi.
- h. Bab VIII (delapan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang penyidikan.
- i. Bab IX (sembilan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang sanksi administrasi.
- j. Bab X (sepuluh) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana.
- k. Bab XI (sebelas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penutup.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pada Bab V yaitu tentang ruang lingkup pengaturan yang terdapat pada bagian keenam tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu yang dijelaskan dalam pasal 30 ayat (2) berisi tentang :

“Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

D. Teori Hukum Islam

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan di atas, bukanlah dalil yang *mubayyan* atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat *mujmal* atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Hubungan antara ilmu *Fiqh* dengan *Fiqh Siyasah* dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *Fiqh Siyasah* dipandang sebagai bagian dari *Fiqh* atau dalam kategori *Fiqh*. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh mujtahid, sedangkan *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.⁴⁵

Sementara mengenai asal kata *siyasah* di kalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat.⁴⁶ Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk *masdhar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara.⁴⁷

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah sebagai berikut: “*siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun

⁴⁵ Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 65.

⁴⁶ Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 2.

⁴⁷ *Ibid.* h.3.

Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.”⁴⁸

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴⁹

Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, *fiqh siyasah* meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan *fiqh siyasah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.⁵⁰

⁴⁸*Ibid.* h.9.

⁴⁹*Ibid.* h. 11.

⁵⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (Peraturan Perundang-undangan), *siyasah maliyah* (Ekonomi dan Moneter), *siyasah qadha'iyah* (Peradilan), *siyasah harbiyah* (Hukum Perang) dan *siyasah 'idariyah* (Administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (Peradilan), *siyasah 'idariyah* (Administrasi Negara), *siyasah maliyah* (Ekonomi dan Moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah* (Hubungan Internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁵¹

Objek kajian *fiqh siyasah* adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasah*

⁵¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 14.

tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam.

Sebagai bagian dari *fiqh*, metode kajian *fiqh siyasah* juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqh* umumnya, yaitu metode *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*. Metode *ushul fiqh* antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'Urf*, *mashlahah mursalah*, dan *istishhab*. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁵²

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian kelompok yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah* (Perundang-Undangan)

Pembahasan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan

⁵²*Ibid.* h. 17.

prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Keseluruhan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan⁵³ semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi menjadi:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan kebijaksanaan tentang penetapan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*. *Waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah aqadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

⁵³Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Cet. Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 47.

- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁵⁴

Dasar hukum *siyasah dusturiyah* meliputi:

- 1) Al-Qur'an secara bahasa berarti bacaan, sedangkan selain kata Al-Qur'an ada juga sebutan al-Kitab menurut bahasa adalah tulisan, sesuatu yang tertulis tetapi sudah menjadi umum di dalam ajaran Islam untuk nama Al-Qur'an, yaitu kalam Allah Swt yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan kata-kata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw dalam pengakuan sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan sebagai mal ibadah bila dibaca.

Adapula yang mendefinisikan Al-Qur'an dengan: Lafal bahasa Arab yang diturunkan untuk direnungi diingat, dan mutawatir. Al-Qur'an tidak mengalami pergantian atau perubahan apa pun. Baik isi, lafal maupun susunan serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dijamin oleh Allah Swt dengan firmanNya:

إِنَّا خُنُّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S Al-Hijr : 9).

⁵⁴Ibid. h, 48.

2) Sunnah, definisi sunnah dalam arti *syar'i*, ialah apa yang bersumber dari Rasul. Perkataan, atau perbuatan, atau ketetapan. Sunnah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama, *sunnah qauliah* yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Saw dalam hal ini berbeda tujuan dan penyesuaiannya. Umpama, sabda Nabi yang berbunyi, jangan merusak dan jangan menyusahkan. Kedua, *sunnah fi'liyah* yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Saw umpamanya, mengerjakan sembahyang yang lima kali sehari **semalam**, dengan cara-cara dan rukun-rukunnya, mengerjakan **manasik** haji, dan mengadili perkara dengan seorang saksi. Ketiga, *sunnah takririah* yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasul, dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat. Berupa perkataan, perbuatan-perbuatan, dan sukutnya (berdiam diri saja) dan tidak mengingkarinya. Atau dengan menyetujuinya, dan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Maka diambil pelajaran dari ketetapan ini, dan menyetujui perbuatan yang bersumber dari Rasul itu sendiri.⁵⁵ Fungsi sunnah ialah memberika penjelasan/keterangan/perincian terhadap hal yang diperkatakan dalam dalam Al-Qur'an. Sebab pada umumnya hal-hal yang dibicarakan dalam Al-Qur'an itu bersifat global (*mujmal*) atau bersifat umum.⁵⁶

⁵⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 37.

⁵⁶Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.36.

- 3) Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti “kaum itu telah sepakat (sependapat) tentang yang demikian itu”.

Menurut istilah, ijma' ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah Saw meninggal dunia. Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah Saw meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar ra. sebagai khalifah pertama. kesepakatan yang seperti ini disebut ijma'. Dasar hukum ijma' adalah Al-Qur'an, sunnah, dan akal pikiran.⁵⁷

- 4) Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengatur. Menurut para ulama *ushul fiqh* qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Mengenai dasar

⁵⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ibid.* h. 43.

hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai hujjah, ialah Al-Qur'an, sunnah, dan perbuatan sahabat.⁵⁸

2. Siyasah Dauliyah

Dauliyah bermakna daulat, kerajaan, kekuasaan, serta wewenang. Sedangkan *siyasah dauliyah* bermakna kekuasaan kepala Negara untuk mengatur Negara dalam hal hubungan internasional.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah dauliyah* lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan Negara.⁵⁹

Siyasah dauliyah juga bisa berarti *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara Negara-negara Islam dengan Negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga Negara muslim dengan warga nonmuslim yang ada di Negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan Negara Islam dengan Negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.⁶⁰

Siyasah dauliyah sudah ada sebelum adanya agama Islam, *siyasah dauliyah* dimasa itu muncul karena adanya untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia, keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar Negara

⁵⁸ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ibid.* h. 50.

⁵⁹ Muhammad Rifqi Ihsani, "*Siyasah Dauliyah*". (Makalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013), h 2.

⁶⁰ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 40.

serta adat kebiasaan internasional, menjadi sumber terpenting dalam hubungan damai masa itu.

Walaupun demikian, gejala hubungan antar Negara yang sering terjadi pada saat itu lebih sering ditandai dengan adanya peperangan, perang menjadi semacam olah raga tahunan bagi suku dan bangsa-bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian perang menjadi hubungan dasar diantara mereka. Setiap Negara yang ada dituntut untuk senantiasa siap siaga dalam mempersiapkan diri untuk perang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan atau membangun banteng perlindungan dari serangan musuh.

Setelah Islam datang *siyasah dauliyah* (hubungan internasional) mendapat banyak perubahan dalam hal perang harus menaati etika perang, harus menepati perjanjian, dan lain sebagainya.⁶¹

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyasah dauliyah* adalah sebagai berikut:

a) Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda Tanah Air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan pikiran yang

⁶¹Muhammad Rifqi Ihsani, *Ibid.* h.3.

positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.⁶² Al-Qur'an mengisyaratkan kesatuan manusia ini, antara lain dinyatakan dalam Q.S Al-Hujurat (13) :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat: 13).

b) Al-Adalah (Keadilan)

Di dalam *siyasah dauliyah*, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik di antara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perangpun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan pegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.⁶³ Sebagaimana dalam firman Allah:

⁶²Djazuli, *Ibid.* h. 122.

⁶³Djazuli, *Ibid.* h. 124.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nissa: 135).

c) Al-Musawah (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar Negara dan antar bangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama.⁶⁴

d) Karomah insaniyah (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Kehormatan kemanusiaan ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan

⁶⁴Djazuli, *Ibid.* h. 125.

komunitas dan biasa dikembangkan menjadi suatu kehormatan bangsa atau Negara.⁶⁵ Sebagaimana dalam firman Allah:

يَتَّخِذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujurat : 11)

e) Kerja sama kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan ini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara Negara di dunia ini. kerja sama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerja sama untuk saling bermusuhan dan berbuat keburukan.⁶⁶

⁶⁵Djazuli, *Ibid.* h. 126.

⁶⁶Djazuli, *Ibid.* h.128.

f) Kebebasan, Kemerdekaan/*Al-Huriyah*

Kemerdekaan sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Macam-macam kebebasan antara lain:

- 1) Kebebasan berpikir, agar manusia terbebas dari keraguan dan *taqlid* buta bahkan Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kebebasan berpikir inilah yang membawa umat Islam kepada keunggulan budaya keilmuan masa lampau.
- 2) Kebebasan beragama, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dia kehendaki dan tidak seorang pun bias memaksa baik dengan kekerasan ataupun dengan cara halus untuk berpindah agama, tidak ada paksaan dalam agama.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat, dalam hal-hal yang berkaitan dengan *al-akhlaq al-karimah* dan kemaslahatan umum dan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wajib. Akan tetapi manusia tidak bebas menyatakan

pendapat yang bersifat permusuhan, penghinaan, dan penghujatan tanpa bukti yang meyakinkan.

- 4) Kebebasan menuntut ilmu, kebebasan ini sesungguhnya adalah akibat dari kebebasan berpikir. Bahkan, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu⁶⁷ yang diistilahkan dengan fardhu ain. Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan fardhu kifayah, yaitu ilmu untuk kemaslahatan masyarakat dan ilmu kategori kedua ini banyak macamnya dan terus berkembang di sinilah letaknya kebebasan memilih ilmu yang dipelajari sesuai dengan profesi, asalkan ilmu yang dipelajari itu bermanfaat.

- 5) Kebebasan memiliki harta, baik benda tetap maupun benda bergerak dalam batas-batas benda yang boleh dimiliki sesuai dengan syariah.⁶⁸

g) Perilaku moral yang baik

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di duni. Seperti yang telah ditemukan bahwa salah satu sumber hubungan internasional adalah perjanjian antar bangsa. Nabi sendiri telah melakukan perjanjian antara lain yang sangat terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah. Dalam kaitan inilah,

⁶⁷Djazuli, *Ibid.* h. 129.

⁶⁸ Djazuli, *Ibid.* h.130.

maka menepati janji sangat penting. Apabila perjanjian telah dibuat dan disahkan kemudian tidak ditepati, maka kepercayaan akan hilang.

Inilah dasar-dasar *siyasah* di dalam hubungan internasional atau *siyasah dauliyah*, dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dsar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa *ukhuwah insaniyah* di samping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun nonmuslim.⁶⁹

3. *Siyasah Maliyah*

Siyasah maliyah atau politik keuangan Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.⁷⁰

Kajian *siyasah maliyah* (Kebijakan Politik Keuangan Negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidun*, dan pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi

⁶⁹ Djazuli, *Ibid.* h. 131.

⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), h. 79.

Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. *siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara dan pos-pos pengeluaran Negara.⁷¹

a) Sumber keuangan Negara dalam *siyasah maliyah* meliputi:

(1) Zakat

Menurut istilah, *zakat* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

(2) *Khumus al-Ghana'im*

Harta *Ghana'im* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan.⁷²

(3) *Fai'*

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta *fai'* dibagikan untuk pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.

⁷¹Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 317

⁷²Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 321.

(4) *Jizyah*

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dari al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyaltas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.

(5) *'Usyur al-Tijarah*

Usyur al-Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang nonmuslim yang melakukan transaksi bisnis di Negara Islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarang. Dalam Negara Islam, kebijaksanaan pemberlakuan pajak perdagangan ini dimulai pada pemerintahan khalifah Umar ibn al-Khatthab. Ketika wilayah kekuasaan Islam masanya mengalami perluasan yang pesat, sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan Negara-negara nonmuslim. Dalam perdagangan tersebut ternyata umat Islam yang melakukan transaksi di Negara nonmuslim dikenakan pajak oleh pemerintah yang bersangkutan.

(6) *Kharaj*

Kharaj diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi.

Pajak tanah ini dibebankan atas tanah nonmuslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam.

Jumlah pajak (*Kharaj*) yang pernah dipraktikan dalam pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya.

Menyangkut teknis pengumpulan *Kharaj* biasanya dilakukan oleh sebuah tim atau dewan yang diberikan wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.⁷³

(7) Sumber-sumber lainnya

Sumber-sumber lainnya ini meliputi: harta warisan yang tidak terbagi, *kaffarat* yaitu denda yang dibayarkan karena melakukan suatu kesalahan/dosa, dan *dam* atau *hadyah* yaitu penyembelihan hewan ternak oleh jamaah haji di Tanah Haram, Mekkah, karena melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah hajinya.

⁷³Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 328.

b) Pengeluaran dan Belanja Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan Negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan Negara Islam. Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Di sini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan, pengeluaran dan belanja Negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran Negara, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan Negara dan warganya, yaitu:

- (1) Untuk orang-orang fakir miskin,
- (2) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara,
- (3) Untuk meningkatkan supremasi hukum,

- (4) Untuk membiayai sector pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas,
- (5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara,
- (6) Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik,
- (7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,
- (8) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.⁷⁴

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu adalah acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Penelitian Dwi Amita Budiarti

| Nama, Tahun, Judul Penelitian | Variabel Dan Indikator atau Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil Penelitian |
|---|---|-----------------------|--|
| Dwi Amita Budiarti (2018) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan | Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik penggunaan | Deskriptif analisis | Di tinjau dari hukum Islam, larangan pemerintah bagi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di fasilitas umum tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 08 |

⁷⁴Muhammad Iqbal, *Ibid.* h. 355.

| | | |
|--|--|---|
| Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat. | fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan pedagang kaki lima. | Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah tersebut membahas mengenai larangan pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum bertujuan menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta keindahan kota, tetapi disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Sehingga pemerintah membuat kebijakan sementara yang member kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, tetapi tidak memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan. |
|--|--|---|

Sumber: Dwi Amita Budiarti, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Keterangan:

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Dwi Amita Budiarti.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Amita Budiarti adalah sama-sama membahas mengenai larangan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu pejalan kaki, jalan raya, dan ketertiban umum. Dan sama-sama menganalisis menggunakan hukum Islam.

Perbedaanya penelitian terdahulu menganalisis praktik penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang, dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan peneliti meneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018

Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Pasir Gintung kota Bandar Lampung, dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Tabel 2
Penelitian Zulkardi

| Nama, Tahun, Judul Penelitian | Variabel Dan Indikator atau Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil Penelitian |
|--|--|-----------------------|---|
| Zulkardi (2019) dengan judul “Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota.. | Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan pedagang kaki lima dan mengetahui peluang dan tantangan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan pedagang kaki lima. | Deskriptif kualitatif | Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan dan qanun. Hal ini dilakukan untuk menertibkan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu pejalan kaki, jalan raya, dan ketertiban umum. Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh adalah banyaknya pedagang kaki lima sedangkan lokasi penjualan di pasar Aceh semakin hari semakin sempit, sehingga menyebabkan pedagang kaki lima berjualan di badan jalan dan emperan toko. Hal ini menjadikan pemandangan yang tidak elok dan sangat mengganggu ketertiban umum. |

Sumber: Zulkardi, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Keterangan:

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Zulkardi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkardi adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima agar tidak mengganggu pejalan kaki,

jalan raya, dan ketertiban umum. Dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaanya penelitian terdahulu juga membahas mengenai peluang dan tantangan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan pedagang kaki lima dan tidak menganalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan peneliti hanya fokus membahas mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima berdasar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan menganalisis menggunakan hukum Islam.

Tabel 3
Penelitian Eka Darma Suryadi

| Nama, Tahun, Judul Penelitian | Variabel Dan Indikator atau Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil Penelitian |
|---|--|-----------------------|--|
| Eka Darma Suryadi (2013) dengan judul "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Meulaboh. | Untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan mengetahui faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban | Deskriptif kualitatif | Implementasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kota Meulaboh selama ini belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan utama kota Meulaboh dan jumlahnya pun terus mengalami peningkatan setiap tahun. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kota Meulaboh diantaranya adalah: belum adanya hukuman yang tegas terhadap para pedagang kaki |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | pedagang kaki lima di kota Meulaboh Kabupaten Banda Aceh. | | lima yang masih berjualan di pinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan pedagang kaki lima di kota Meulaboh. |
|--|---|--|--|

Sumber: Eka Darma Saputra, Skripsi, Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2013.

Keterangan:

3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Eka Darma Saputra adalah.

Persamaan yang dilakukan oleh penelitian Eka Darma Saputra adalah sama-sama membahas mengenai implementasi kebijakan terhadap penertiban pedagang kaki lima, dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaannya penelitian terdahulu membahas mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Meulaboh Banda Aceh, dan tidak menganalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima berdasar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan menganalisis menggunakan hukum Islam.

Tabel 4
Penelitian Widi Astuti

| Nama,Tahun, Judul Penelitian | Variabel Dan Indikator atau Fokus Penelitian | Metode/ Analisis Data | Hasil Penelitian |
|--|--|-----------------------------|---|
| Widi Astuti (2016) dengan judul "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Tahun 2010-2012. . | Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikawasan Malioboro.. | Deskriptif kualitatif | Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta diharapkan mengambil tindakan yang tegas dalam melakukan penertiban. Dan perlunya pemberian kewenangan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja kota Yogyakarta untuk lebih mengoptimalkan tupoksinya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya serta perlunya melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penertiban PKL. |

Sumber: Widi Astuti, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Keterangan:

4. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Widi Astuti adalah.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Astuti adalah sama-sama membahas mengenai penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas mengenai penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan tidak menganalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan menganalisis menggunakan hukum Islam.



**IMPLEMENTASI PASAL 30 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI PASAR PASIR GINTUNG KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**SINDIKA ADELIA HASANAH
NPM. 1621020356**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainudin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Djazuli .A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Cet. Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarif Ibnu , Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* ,Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kansile, Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2007.
- Pujo M Darmo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Pemerintah Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasyid Ryaas, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Llatar Belakang dan Masa Depan*, Jakarta: Lipi Press, 2007.
- Saebeni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* , Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Setiawan Irfan, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Wahana Resolusi, 2018.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Somad. Abd, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sholihin Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Sudirwo Daeng, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Angkasa, 1991.

Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.

Sugiono, Wijayanto Wisnu Putro, Kartika Indah Sylvie Sari, *Ergonomi Untuk Pemula (Prinsip Dasar & Aplikasinya)*, Malang: UB Press, 2018.

Supriady Deddy, Solihin Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Nurdian Susilowati, *Kewirausahaan*, Bandung: Ahli Media Book, 2017.

Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Wahab Abdul Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.

Wahab Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Jurnal

A Syamsu Alam, Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Kajian Implementatif, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar, 2012.

Dian Azhari, Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Atas Dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017.

Rachmawati Madjid, Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Lingkungan Di DKI Jakarta, Skripsi Program Sarjana Fakultas *Ekonomi*, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2013.

Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (25).

Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Naskah Ilmiah

Muhammad Rifqi Ihsani, “*Siyasah Duliyyah*”, Makalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Wawancara

Eka, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 19 Februari 2020.

Eni, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 20 Februari 2020.

Ismi, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 19 Februari 2020.

Janroma, wawancara dengan penulis, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 10 Februari 2020.

Joni Hariansyah, wawancara dengan penulis, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pasir Gintung, wawancara. 27 Januari 2020.

Mariani, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 20 Februari 2020.

Oktafianus Libranto, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung, 12 Februari 2020.

Ridho, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 20 Februari 2020.

Rini, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 19 Februari 2020.

Sari, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 19 Februari 2020.

Wagino, wawancara dengan penulis, Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung, 19 Februari 2020.

Sumber on-line

Dunia Pendidikan, “Tujuan Kebijakan Pemerintah: Pengertian, Sifat dan Macamnya” (On-line), tersedia di : <http://duniapendidikan.co.id/tujuan-kebijakan-pemerintah-pengertian-sifat/> (6 Januari 2020).

Pedagang Kaki Lima (On-line) tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki-lima (5 Januari 2020)

Wikipedia, “Pemerintah Daerah di Indonesia” (On-line) tersedia di https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia (6 Januari 2020)